

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Rasio efektivitas Pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten TTU Tahun anggaran 2009 - 2011 dapat dinilai tidak efektif karna dibawah dari 75%. Dimana tahun anggaran 2009 sebesar 46,48%, tahun anggaran 2010 sebesar 37,36% dan tahun anggaran 2011 sebesar 35,95 %.
2. Rasio efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten TTU tahun anggaran 2009 – 2011 mengalami fluktuasi dan dinilai belum cukup efektif. Dimana pada tahun 2009 sebesar 378,00%, tahun 2010 sebesar 90,09% dan tahun 2011 sebesar 60,98%. Dan dari ketiga tahun anggaran tersebut efektivitas pajak daerah yang baik pada tahun 2009.
3. Derajat kontribusi BUMD Pemerintah Daerah Kabuapten TTU Tahun anggaran 2009 - 2011 mengalami peningkatan dari ketiga tahun anggaran tersebut. Dimana pada tahun anggaran 2009 sebesar 11,13% ,tahun anggaran 2010 sebesar 16,61% dan tahun anggaran 2011 sebesar 22,11%.
4. Modal kerja Pemerintah Daerah Kabupaten TTU Tahun anggaran 2009 - 2011 mengalami peningkatan dari ketiga tahun

anggaran tersebut. Dimana pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 31.995.562. 662,10, tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 43.961.210.867,70 dan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 66.517.564,04. Hal ini ditunjukkan pada tahun anggaran 2009 - 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp. 11.965.648.205,60 dan pada tahun anggaran 2010 - 2011 mengalami peningkatan juga sebesar Rp. 22.725.306.696,34.

5. Analisi rasio keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten TTU Tahun anggaran 2009 - 2011 menunjukkan bahwa kondisi keuangan pada tahun anggaran 2010 lebih baik dibandingkan dengan tahun anggaran 2009 dan 2011, baik dari Rasio Likuiditas maupun Rasio Solvabilitas. Sedangkan untuk Rasio utang mengalami perubahan yaitu besarnya tidak sama (mengalami fluktuasi) pada ketiga tahun anggaran tersebut.
6. Analisis Arus Kas untuk setiap komponen tahun anggaran 2009 - 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten TTU menunjukkan kinerja yang baik.
7. Analisi Arus Kas Bebas Pemerintah Daerah Kabuapten TTU Tahun anggaran 2009 - 2011 menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten TTU baik karna belanja modal yang dilakukan oleh Pemda bisa dibayar dari kas aktivitas operasi.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, maka disaran hal – hal sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, maka Pemerintah kabupaten TTU perlu meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
2. Intensifikasi Pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten TTU dengan cara : Menambah dan memperbaiki fasilitas umum seperti : Pasar, terminal dan tempat rekreasi yang menjadi objek punggutan pajak/retribusi daerah di Pemerintah kabupaten TTU.
3. Upaya peningkatan kinerja pengelolaan penerimaan PAD dari aspek efektivitas perlu dilakukan dengan cara : Perhitungan potensi yang akurat (termasuk data wajib pajak/retribusi), membangun kerjasama dengan pihak investor sehingga memberdayakan semua potensi yang ada dan saling koordinasi antar instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Berstein, Leopold A. 1983. *Financial Statement Anlysis, Teory Application, and Interpretation*. 3rd ed. Richard D. Irwin.

Foster, George. 1986. *Financial Statement Analysis*. 2nd ed. Prentice Hall.

M. Faizal Abdullah, (2002), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

Mahmudy, (2007), *Analisis Keuangan Daerah*, Penerbit UPP STIM YPKN, Edisi kedua.

_____, (2010), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit UPP STIM YPKN, Edisi kedua.

Mursyidi, (2009), *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, PT. Refika Adiatama.

Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andy Yokyakarta.

_____ (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andy Yogyakarta.

Mulyady, (2001), *Sistem Akuntansi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Munir, (2004), *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.

Sofyan S. Harahap, (2008), *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Republik Indonesia Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah,

Undang – undang 33 tentang Perimbangan Keuanga antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004.

_____ Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

_____ Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara.